

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi yang pesat di era digital telah membawa perubahan besar dalam tata kelola pemerintahan, dan dunia kerja. Transformasi digital mendorong organisasi baik publik maupun swasta, untuk mengadopsi sistem berbasis teknologi informasi demi meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Dalam konteks administrasi pemerintahan, salah satu bentuk nyata implementasi transformasi digital adalah penerapan *sistem absensi online* sebagai pengganti sistem absensi manual. Penggunaan sistem ini tidak hanya mencerminkan modernisasi birokrasi, tetapi juga menjadi langkah penting dalam meningkatkan efektivitas pengawasan dan kedisiplinan pegawai negeri (Vergiawan & Kriswibowo, 2024).

Di Indonesia, kewajiban pegawai untuk hadir tepat waktu dan menaati ketentuan jam kerja diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang menegaskan bahwa setiap ASN wajib masuk kerja dan menaati seluruh ketentuan terkait jam kerja yang ditetapkan. Aturan ini memperlihatkan bahwa kedisiplinan merupakan pilar utama dalam menjaga kinerja organisasi publik. Maka dari itu, sistem absensi online hadir tidak hanya sebagai alat administratif, tetapi juga sebagai instrumen pengawasan untuk menegakkan disiplin secara lebih efektif.

Sistem absensi online berfungsi sebagai sarana untuk merekam kehadiran pegawai secara otomatis dengan bantuan perangkat teknologi seperti smartphone, fingerprint scanner, atau aplikasi berbasis web. Dibandingkan dengan sistem manual, absensi online memberikan kemudahan dalam proses pencatatan waktu kerja, rekapitulasi data kehadiran, dan pelaporan kinerja pegawai secara real time. Menurut Hawa dan Nafi'a (2024), sistem absensi digital mampu meningkatkan efisiensi dan akurasi data kehadiran, sehingga dapat mempercepat proses pengambilan keputusan dalam manajemen kepegawaian. Namun, efektivitas sistem tersebut bergantung pada kesiapan teknologi, kemampuan sumber daya manusia, serta kebijakan organisasi yang mendukung implementasinya.

Penerapan sistem absensi berbasis digital di lingkungan instansi pemerintahan di Indonesia mulai digalakan seiring kebijakan reformasi birokrasi dan transformasi menuju e-government. Pemerintah berupaya memperkuat sistem pengawasan pegawai dengan teknologi agar lebih objektif dan efisien. Meski demikian, berbagai penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem absensi online tidak selalu berjalan sesuai harapan. Studi yang dilakukan oleh Aprianti (2023) di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjar menemukan bahwa masih terdapat ketidaktepatan waktu hadir dan pulang kerja, serta kendala teknis seperti gangguan jaringan dan ketidaksesuaian data kehadiran yang menurunkan efektivitas sistem.

Fenomena yang sama juga ditemukan dalam penelitian Ruauw, Tumbel, dan Kawahe (2023) yang menjelaskan bahwa ketidakpahaman pegawai terhadap cara penggunaan sistem menjadi salah satu faktor penghambat utama efektivitas

absensi berbasis elektronik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan teknologi tidak hanya bergantung pada kecanggihan sistem, tetapi juga pada aspek literasi digital dan kesiapan individu pengguna. Tanpa adanya pelatihan dan pendampingan yang memadai, sistem digital berpotensi tidak digunakan secara optimal dan justru menimbulkan resistensi dari pengguna.

Selain aspek teknis dan sumber daya manusia, efektivitas absensi online juga bergantung pada dukungan organisasi dan kebijakan internal. Erlinda, Septian, dan Rupiarsieh (2024) menyatakan bahwa sistem absensi digital akan berfungsi secara optimal apabila didukung oleh kebijakan manajemen yang tegas dan konsisten dalam menegakkan disiplin kerja. Inovasi teknologi seperti aplikasi *Sikepo* di Kabupaten Bojonegoro terbukti mampu meningkatkan kedisiplinan pegawai, asalkan disertai dengan pengawasan dan evaluasi yang berkelanjutan. Hal ini menegaskan pentingnya sinergi antara teknologi, regulasi, dan budaya organisasi dalam menciptakan efektivitas sistem kehadiran pegawai.

Sementara itu, penelitian Harkenani dan Susianti (2020) di Provinsi Jambi juga menunjukkan bahwa meskipun penerapan sistem absensi digital *SiAbOn* telah membantu mengawasi kedisiplinan ASN di masa normal baru, masih terdapat hambatan teknis berupa error sistem, gangguan jaringan, dan keterbatasan fasilitas yang mengganggu keakuratan data kehadiran. Permasalahan ini juga diperkuat oleh hasil penelitian Rosyada dan Setiaji (2025) di ATR/BPN Kudus yang menyebutkan bahwa kesiapan infrastruktur dan kemampuan SDM menjadi dua faktor kunci dalam keberhasilan sistem absensi berbasis web. Tanpa kesiapan tersebut, tujuan efisiensi dan akurasi data kehadiran tidak akan tercapai.

Selain meningkatkan efisiensi, sistem absensi online juga berperan strategis dalam membangun budaya disiplin kerja di lingkungan pemerintahan. Menurut Johannes, Mamonto, dan Carvalho Cavalcante (2025), penggunaan absensi digital secara konsisten dapat memperkuat tanggung jawab pegawai terhadap jam kerja dan produktivitasnya. Namun, jika sistem tidak efektif atau sering mengalami gangguan, hal tersebut justru dapat menimbulkan ketidakpuasan dan menurunkan semangat kerja pegawai. Oleh karena itu, penting untuk menilai seberapa jauh efektivitas sistem absensi online dalam mencapai tujuan organisasi, khususnya dalam meningkatkan disiplin ASN.

Pemerintah Kota Banjar, sebagai penerima kewenangan dalam tugas pemerintahan juga dituntut untuk meningkatkan disiplin seluruh pegawainya, maka Wali Kota Banjar menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 864/50/2021 tentang Penerapan Absensi *Online* Melalui Sistem Informasi Kehadiran Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Banjar. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Banjar, sebagai salah satu unit kerja pada Pemerintah Daerah tersebut merupakan sebagai pusat perkantoran kepala daerah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Organisasi ini dituntut untuk menghasilkan kinerja baik secara individual maupun secara kelompok. Untuk menunjang kinerja seorang pegawai atau Aparatur Sipil Negara diperlukan pegawai atau aparatur yang memiliki disiplin kerja yang sesuai dengan kebutuhan diperlukan pada suatu instansi pemerintah.

Adapun permasalahan umum yang terjadi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Banjar yaitu bagaimana pengaruh penerapan

absensi online di lingkup Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Banjar terhadap peningkatan disiplin waktu dan kinerja pegawai. Berdasarkan hasil observasi awal, terdapat beberapa indikator permasalahan dalam penerapan absensi online tersebut, seperti :

1. Ketidaksiapan pegawai terhadap perubahan budaya kerja / peraturan yang berlaku yang secara tidak langsung harus merubah mindset dan perilaku hidup sehari-harinya. Hal ini bisa dilihat dari masih adanya ketidaktepatan waktu hadir dan pulang kerja pegawai, sehingga masih ada pegawai yang datang terlambat dan pulang semauanya tidak sesuai dengan jam kerja yang telah ditentukan.
2. Masih terbatasnya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan presensi baik perangkat masing-masing pegawai (HP Android) maupun server aplikasi yang digunakan. Hal ini terlihat dari masih terjadinya kendala teknis pada saat melakukan presensi sehingga dapat menghambat lancarnya proses presensi bagi para pegawai sebagai usernya.
3. Masih terdapatnya pegawai yang memahami IT dan merasa kebingungan dengan diberlakukannya presensi online. Hal ini terlihat dari beranekaragamnya pendidikan dan keterampilan pegawai, sehingga berdampak juga pada lancar tidaknya pelaksanaan penerapan presensi online bagi para pegawai.

Situasi ini menunjukkan bahwa tujuan utama penerapan sistem untuk meningkatkan disiplin kerja dan efisiensi administrasi belum sepenuhnya tercapai.

Oleh karena itu, berdasarkan permasalahan dan uraian tersebut penulis tertarik untuk melakukan kajian dan penelitian dengan judul **“EFEKTIVITAS PENERAPAN SISTEM PRESENSI ONLINE DI DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BANJAR”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis dapat merumuskan permasalahan, yaitu: Bagaimana efektivitas penerapan sistem presensi online di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Banjar ?.

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah: Untuk mengetahui bagaimana efektivitas penerapan sistem presensi online di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Banjar.

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu administrasi publik dan manajemen sumber daya manusia, khususnya yang berkaitan dengan penerapan teknologi informasi dalam sistem kepegawaian instansi pemerintah. Penelitian ini diharapkan memperkaya kajian mengenai efektivitas organisasi, sebagaimana dijelaskan oleh Campbell dalam Mutiarin (2014), yang menyoroti lima indikator utama efektivitas yaitu:

keberhasilan program, keberhasilan sasaran, kepuasan terhadap program, kesesuaian input dan output, serta pencapaian tujuan menyeluruh.

Selain memperkuat teori yang sudah ada, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi ilmiah bagi mahasiswa, akademisi, dan peneliti lain yang tertarik mengkaji topik tentang transformasi digital birokrasi, disiplin kerja ASN, serta pengaruh penerapan sistem absensi online terhadap kinerja organisasi publik. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada aspek praktis, tetapi juga pada pengembangan kerangka konseptual dalam bidang administrasi publik modern.

1.4.2 Kegunaan Praktis

(1) Bagi Instansi Pemerintah Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi, dan pengambilan keputusan bagi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Banjar dalam mengoptimalkan sistem absensi online yang telah diterapkan. Penelitian ini juga dapat membantu instansi untuk mengidentifikasi hambatan, kelemahan, serta strategi peningkatan efektivitas sistem absensi digital guna memperkuat disiplin dan kinerja pegawai.

(2) Bagi Lembaga Pemerintah Daerah dan Aparatur Sipil Negara (ASN) Penelitian ini dapat menjadi acuan perbaikan kebijakan kepegawaian dalam konteks transformasi digital pemerintahan, khususnya dalam penerapan sistem pengawasan kehadiran berbasis teknologi. Hasil

penelitian ini dapat digunakan sebagai model evaluasi efektivitas sistem absensi digital di instansi lain yang memiliki karakteristik serupa.

(3) Bagi Penulis Penelitian ini menjadi sarana bagi penulis untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan dalam bidang administrasi publik, khususnya dalam hal analisis efektivitas kebijakan digitalisasi pelayanan kepegawaian. Selain itu, penelitian ini memperkaya wawasan penulis mengenai dinamika penerapan teknologi informasi di lingkungan birokrasi publik.

(4) Bagi Pengembang Ilmu Pengetahuan Administrasi Publik Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah dalam pengembangan konsep dan praktik administrasi publik modern, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya manusia berbasis teknologi digital. Temuan penelitian ini dapat dijadikan landasan empiris untuk penelitian lanjutan yang berfokus pada efektivitas penerapan inovasi digital di sektor publik.